

KENDALIKAN PMK, SKRINING AWAL DIPERKETAT

DP3 Sleman Tak Tutup Operasional Pasar Hewan

SLEMAN (KR) - Meski jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak milik warga terus bertambah, namun DP3 Sleman tidak akan menutup operasional pasar hewan. Hanya saja skrining awal sapi masuk diperketat.

“Di beberapa daerah, untuk melakukan pengendalian penyakit sejumlah pasar hewan mulai ditutup. Tetapi kebijakan kami, sesuai permintaan masyarakat dan pedagang, pasar hewan kami tetap buka. Tapi skrining awal sapi masuk diperketat,” tandas Plt Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono kepada *KR*, Minggu (12/1).

Menurutnya, pengetatan skrining di pasar hewan Ambarketawang Gamping dilakukan dengan menempatkan dua dokter hewan di depan masuk pasar. Mereka mengawasi dan mengecek satu persatu kendaraan yang datang membawa ternak. Kalau ada indikasi ternak bergejala PMK, terutama dilihat dari seputar mulut dan kakinya, armada tersebut disetop dan diminta putar balik.

“Jumat kemarin kami sudah menolak dua armada karena sapinya bergejala. Kita tolak dan diminta pulang. Sehingga sapi yang dijual di dalam pasar relatif sudah aman,” kata Suparmono.

Sapi yang lolos pemeriksaan di depan pasar kemudian diperbolehkan masuk,

dengan diarahkan melewati gerbang desinfektan. Proses penyemprotan disinfektan dinilai sudah standar. Bukan hanya ternak yang terkena semprotan melainkan juga kendaraan pengangkutnya.

Disinggung perkembangan kasus PMK di Sleman, diakui Suparmono, trend kasus cenderung mengalami peningkatan. Sejak kasus ternak sakit pada Februari 2024 hingga bulan Januari 2025 ini, telah ditemukan 556 ekor ternak terpapar PMK, semuanya sapi. Untuk kasus kesembuhan, begitu juga kematian sapi terus bertambah. Di periode yang sama, jumlah sapi sembuh 301 ekor, sedangkan sapi yang mati 28 ekor, enam persen di antaranya dipotong paksa.

“Muncul sejak Februari 2024, tapi kasusnya sedikit. Kemudian meningkat agak tinggi di Desember-Januari ini, ada 14 ekor mati. Tapi tidak mati di Desember dan Januari semua. Melainkan ada yang mati di bulan sebelumnya, namun pelaporan ke Iskhinas terlambat,” katanya.

Jika melihat data yang ada, lanjut Suparmono, kasus PMK di Kabupaten

Sleman muncul kembali namun masih relatif terkendali. Hal itu dengan asumsi tingkat kematian ternak terbilang rendah sedangkan angka kesembuhan tinggi sekira 54 persen. Hal ini tidak lepas dari upaya pengendalian untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tersebut.

“Selain pengobatan bagi ternak yang sakit, kami juga melaksanakan vaksinasi terhadap sapi yang sehat, penyemprotan dan pengetatan pasar hewan, pemberian disinfektan serta melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pedagang ternak. Kami selalu mengimbau agar selalu menjaga kebersihan kandang,” ujarnya.

Upaya ini untuk mencegah agar tidak terjadi penularan terhadap ternak yang lain. “Jika sudah dikarantina, dokter hewan kami juga akan mengamati lebih intensif. Kebersihan kandang memegang kunci penting. Selain bersih, jika memungkinkan juga disemprot disinfektan. Jika tidak punya silakan mengajukan ke kami melalui Poskeswan,” tambahnya. **(Has)-f**



KR-Istimewa

Ternak berikut kendaraan yang masuk Pasar Hewan Ambarketawang disemprot disinfektan sebagai bagian skrining awal yang ketat.

DI PASAR HEWAN AMBARKETAWANG

Transaksi Jual Beli Sapi Turun 80 Persen

SLEMAN (KR) - Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak, menyebabkan transaksi jual beli ternak sapi anjlok. Di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping, transaksi jual beli ternak khususnya sapi menurun tajam hingga 80 persen dari biasanya.

Menurut Kepala UPTD Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Yuda Andi Nugroho, anjloknya transaksi ini berimbas pada penurunan ekonomi pedagang dan retribusi Pendapatan asli daerah (PAD) yang diraup Pemkab Sleman. Pasaran terakhir, terjadi penurunan hampir 80 persen mulai dari sapi yang masuk juga transaksi yang terjadi.

“Transaksi jual beli ternak di Pasar Hewan Ambarketawang biasanya di kisaran 30 - 50 ekor dari jumlah ter-

nak masuk 270 - 300 ekor sapi. Tetapi semenjak ada peningkatan kasus PMK di Kabupaten Sleman, jumlah sapi yang dibawa pedagang masuk ke pasar hewan Ambarketawang di pasaran pekan lalu hanya 70 ekor. Dari jumlah tersebut yang laku terjual hanya 9 ekor. Jadi transaksi mengalami penurunan hampir 80 persen,” ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan Yuda, kebijakan Pemkab Sleman tidak menutup pasar hewan meskipun angka kasus PMK mengalami peningkatan. Pertimbangannya, agar ekonomi masyarakat pedagang ternak tetap berjalan. Untuk mengendalikan laju penularan, pihaknya memantau lalu lintas ternak yang keluar masuk area pasar dengan cara memperketat pengawasan.

“Kalau dalam pemeriksaan dite-

mukan ada ternak bergejala PMK maka pedagang akan diminta untuk putar balik. Untuk ternak yang lolos skrining, diperbolehkan masuk pasar dengan melewati gerbang disinfeksi. Jadi benar-benar ternak yang sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit PMK yang boleh masuk. Ternak dan kendaraan juga disemprot, ini benar-benar kami antisipasi dari awal,” katanya.

Petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area pasar hewan selepas kegiatan pasaran. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Sebab bisa jadi ternak yang belum bergejala, dan masuk ke area pasar juga membawa virus penyebab PMK, sehingga dilakukan penyemprotan untuk langkah antisipasi di kegiatan pasaran berikutnya. **(Has)-f**

SOAL MASA JABATAN KUSTINI-DANANG

Sampai Bupati dan Wabup Terpilih Dilantik

SLEMAN (KR) - Masa jabatan Bupati Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Danang Maharsa akan berakhir sampai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Sedangkan untuk kepastian pelantikan masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Sleman Hasto Karyantoro SIP menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020, yang salah satu amar putusannya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020, menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta alikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatannya.

“Jadi nanti tidak ada penjabat atau Plt. Tapi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sleman ini sampai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik,” kata Hasto usai Rapat



KR-Saifullah Nur Ichwan

Hasto Karyantoro

paripurna DPRD Kabupaten Sleman pengumuman penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Terpilih serta pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Jumat (10/1).

Untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, kemungkinan pelantikan mundur dari jadwal sebelumnya yakni 10 Februari 2025.

DPRD Kabupaten Sleman masih menunggu kepastian dari Kemendagri. “Rumornya mundur di Maret 2025. Tapi untuk kepastiannya kami masih menunggu dari Mendagri,” terangnya.

Setelah rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sleman akan segera mengirimkan surat ke Kemendagri melalui Gubernur DIY untuk pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. “Kami mempersiapkan waktu 5 hari kerja setelah diterima surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sleman dari KPU Sleman,” tabah Hasto. **(Sni)-f**

Untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, kemungkinan pelantikan mundur dari jadwal sebelumnya yakni 10 Februari 2025.

Setelah rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sleman akan segera mengirimkan surat ke Kemendagri melalui Gubernur DIY untuk pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. “Kami mempersiapkan waktu 5 hari kerja setelah diterima surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sleman dari KPU Sleman,” tabah Hasto. **(Sni)-f**

Untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, kemungkinan pelantikan mundur dari jadwal sebelumnya yakni 10 Februari 2025.

Setelah rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sleman akan segera mengirimkan surat ke Kemendagri melalui Gubernur DIY untuk pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. “Kami mempersiapkan waktu 5 hari kerja setelah diterima surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sleman dari KPU Sleman,” tabah Hasto. **(Sni)-f**

Aset BPRS HIK MCI Tembus Rp 300 M



KR-Istimewa

Edy Suandi Hamid menyerahkan paket sembako kepada peserta jalan santai.

NGAGLIK (KR) - Sebanyak 250 peserta lebih mengikuti jalan santai dalam peringatan 17 Tahun Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah - Mitra Cahaya Indonesia (BPRS HIK MCI) Yoga. Kegiatan yang diadakan Sabtu (11/1) itu diikuti jajaran manajemen, pemegang saham, Perbarindo, nasabah, dan mitra kerja, seperti dari kalangan pengusaha, kampus, sekolah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan

lain-lain. Start dan finish dari Kantor BPRS HIK MCI di Jalan Kaliurang Km 9 Sleman. dilepas oleh komisariss Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.

“Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Milad ke-17 BPRS HIK MCI. Selain itu juga ada pengajian tasyakuran, pembagian 750 paket sembako, khotmil Quran, pengobatan gratis, santunan anak yatim, lomba-lomba, serta bagi-bagi doorprize,” kata Komisaris Utama

BPRS HIK MCI Dede Haris Sumarno.

Dirut BPRS HIK MCI Kholid menyampaikan, rasa syukurnya karena menjelang milad ini aset BPRS menembus angka lebih dari Rp 300 miliar. Hal itu melampaui target dari Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024. Selain itu, pembiayaan, laba, serta kredit bermasalah (NPL) semakin rendah. “Total pembiayaan tahun 2024 sudah lebih dari Rp Rp 225 miliar,” ujarnya.

Berbagai pencapaian yang terus meningkat ini, membuat manajemen dan pemegang saham semakin optimis memasuki tahun 2025. “Memang perekonomian kita tidak terlalu cerah dalam tahun 2025 ini. Namun dengan terus meningkatkan kinerja manajemen, kita optimis BPRS ini akan terus tumbuh dan memperkokoh posisinya di tempat teratas di DIY ini,” tegas Komisaris sekaligus pemegang saham BPRS HIK MCI, Edy Suandi Hamid. **(Ria)-f**

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id

Berlangganan
Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.